

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemaknaan Yuridis Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Falentina Ikun Baba, Nim 21310127, Rumusan Masalah penelitian penulis adalah: 1). Mengapa Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Mahkamah Konstitusi. 2). Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat. 3). Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Mahkamah Konstitusi, alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Sedangkan Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemaknaan Yuridis Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis menyimpulkan bahwa: 1). Alasan pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum perdata adalah: a). Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). b). Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merugikan Hak Konstitusional Pemohon. 2). Alasan Mahkamah Konstitusi Membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat adalah: a). Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan ketidakpastian hukum. b). Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan ketidakadilan. 3). Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah: a). Orang dungu, sakit otak, mata gelap dan boros tidak harus ditempatkan dibawah pengampuan. b). Pilihan menempatkan orang dungu, sakit otak, mata gelap dan boros kembali kepada hak warga Negara. Saran yang penulis berikan adalah dalam suatu perundang-undangan maka yang harus diperhatikan adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum.

Kata Kunci : Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Mahkamah Konstitusi

ABSTRAC

This thesis entitled “ Judicial interpretation of article 433 of the Civil Code by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Falentina Ikun Baaba, Nim 21310127, The author’s research problem formulation is: 1).why did the petitioner submit a judicial review of article 433 of the Civil Code at the Constitutional Court. 2). Why did the Constitutional Court cancel the word must in Article 433 of the Civil Code and interpret it as the word can? 3). What are the legal consequences of the constitutional Court’s decision? This research is descriptive in nature and the type of reseacrh used is normative research. The independent variable in this research is the reason the Constitutional Court canceled the word must in Article 433 of the Civil Code and interpreted it with the word can. Meanwhile, the depedent variabel in this research is the Constitutional Court Decision regarding the judicial Meaning of article 433 of the Civil Code. Based on the results of research conducte Article 433 by the author, the author concludes that: 1). The applicant’s reasons for requesting a judicial reviiw of article 433 of the Civil Code are: a). Article 433 of the Civil Code is contrary to Article 28D paragraph (1). b). Article 433 of the Civil Code is detrimental to the petitioner’s Constitutional Rights. 2). The reasons for the Constitutional Court canceling the word must in Article 433 of the Civil Code and interpreting it with the word can are: a) Article 433 of the Civil Code are: a) Article 433 of the Civil Code creates legal uncertainty. b). Article 433 of the Civil Code creates injustice. 3). The legal consequences of the Constitutional Court decision are: a). The imbecile, the brain-sick the dark-eyed and the extravagant should not be placed under amnesty. b). The choice of placing stupit, brain sick, dark- eyed and wasteful people back into the rights of citizens. The advice that the author gives is that in a piece of legislation., what must be takeninto account is the provisions of the 1945 Constitutional as the highest source of law and the source of all source of law.

Keywords: Article 433 of the Civil Code, Constitutional Court